

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia dikenal sebagai negara agraris karena mayoritas penduduknya bekerja dalam sektor pertanian. Sektor pertanian di Indonesia memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Peran penting sektor pertanian ini dapat dilihat dari indikator kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja (Haryanto, 2009). Menurut data Badan Pusat Statistik (2017), kontribusi sektor pertanian cukup baik terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) berdasarkan harga berlaku sebesar 13,95 persen pada tahun 2017. Apabila dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya, kontribusi sektor pertanian terbesar ketiga setelah sektor industri dan sektor perdagangan yang masing-masing sebesar 19,93 persen dan 15,73 persen. Jika dilihat dari indikator penyerapan tenaga kerja justru sektor pertanian menjadi sektor terbesar dalam menyerap tenaga kerja, yaitu sebesar 29,68 persen pada tahun 2017. Kontribusi masing-masing sektor ekonomi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia pada tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 1.1. di bawah ini:

**Tabel 1.1.**  
**Kontribusi Sektor Ekonomi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia Tahun 2017**

Sektor	Kontribusi terhadap PDB (%)	Penyerapan Tenaga Kerja (%)
Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	13,95	29,68
Pertambangan dan Penggalian	7,15	1,15
Industri	19,93	14
Listrik, Gas, dan Air Minum	1,26	0,32
Konstruksi	10,24	6,72
Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi	15,73	23,27
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	9,3	4,76
Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	8,67	3,1
Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan	9,58	17

Sumber: Badan Pusat Statistik, tahun 2017 (diolah)

Besarnya kontribusi sektor pertanian membuat sektor ini sangat penting untuk lebih di perhatikan. Perekonomian nasional semakin berkembang pesat jika diiringi dengan berkembangnya sektor pertanian. Akan tetapi, hingga saat ini masih dihadapi oleh masalah klasik seperti keterbatasan modal (Sugiyono, 2010). Meskipun saat ini semakin mudahnya akses permodalan, tetapi untuk penyaluran kredit bagi sektor pertanian masih sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya jaminan bagi petani untuk memperoleh akses kredit, pembayaran tiap bulan yang tidak sesuai dengan pendapatan petani, biaya transaksi yang tinggi dan anggapan perbankan yang memandang sektor pertanian sebagai *high risk industry* (Beik, 2013).

**Tabel 1.2.**  
**Posisi Kredit Perbankan Menurut Sektor Ekonomi Tahun 2013-2017**  
**(Miliar Rupiah)**

Sektor	2013	2014	2015	2016	Mei 2017
Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	98.385	132.226	159.624	183.258	192.850
Pertambangan dan Penggalian	31.310	46.595	57.711	57.737	58.339
Industri	127.700	180.815	219.982	228.105	230.453
Listrik, Gas, dan Air Minum	48.099	70.296	85.544	108.585	103.746
Konstruksi	25.718	44.928	52.129	61.219	61.079
Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi	122.618	163.508	186.309	194.353	192.192
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	84.365	99.313	97.645	94.226	93.952
Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	65.460	94.172	98.897	112.110	111.950
Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan	36.110	62.789	67.254	75.418	73.288

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, tahun 2013-2017.

Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2017) pada Tabel 1.2. menunjukkan rendahnya proporsi penyaluran kredit perbankan untuk sektor pertanian dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya. Pinjaman kredit sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, dan perikanan dari tahun 2013 hingga tahun 2016 menempati urutan ketiga setelah

sektor industri dan sektor perdagangan dengan kenaikan sebesar Rp 84.873 miliar atau naik kurang lebih dua kali lipat. Proporsi kredit sektor pertanian secara bertahap terus meningkat hingga pada bulan Mei 2017 menempati urutan kedua setelah sektor industri dengan kenaikan sebesar Rp 9.592 miliar. Meskipun terus meningkat tiap tahunnya, tetapi peningkatan ini masih cukup rendah bila dibandingkan dengan sektor industri yang meningkat sebesar Rp 102.753 miliar dari tahun 2013 hingga bulan Mei 2017.

Rendahnya penyaluran kredit sektor pertanian pada perbankan konvensional dapat diatasi dengan alternatif pembiayaan sistem syariah pada perbankan syariah. Sistem pembiayaan pada perbankan syariah untuk sektor pertanian adalah dengan sistem bagi hasil, yaitu keuntungan dan kerugian di tanggung bersama. Sistem bagi hasil ini dapat menjadi alternatif yang baik bagi sektor pertanian yang terbilang cukup memiliki risiko yang tinggi karena musim panen yang berpengaruh dengan faktor iklim.

Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada Tabel 1.3. bahwa pembiayaan syariah sektor pertanian dalam kurun waktu lima tahun mengalami peningkatan tiga kali lipat, yaitu dari Rp 3.165 miliar pada tahun 2013 menjadi Rp 11.881 miliar pada tahun 2017. Namun jika dibandingkan dengan total pembiayaan perbankan syariah menurut sektor yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), maka proporsi pembiayaan sektor pertanian pada tahun 2017 hanya 7 persen. Tentunya proporsi ini lebih rendah dibandingkan dengan pembiayaan sektor perdagangan sebesar 22

persen, pembiayaan sektor lembaga keuangan, real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan sebesar 19 persen dan sektor konstruksi sebesar 13 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pembiayaan sektor pertanian masih bergerak lambat.

**Tabel 1.3.**  
**Pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Berdasarkan Sektor Ekonomi (Miliar Rupiah)**

Sektor	2013	2014	2015	2016	2017
Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	3.165	5.679	9.148	9.936	11.881
Pertambangan dan Penggalian	3.018	4.597	6.145	6.604	6.864
Industri	6.029	13.300	17.982	19.745	21.463
Listrik, Gas, dan Air Minum	4.663	5.492	6.427	8.117	11.044
Konstruksi	8.086	11.669	11.193	14.435	22.198
Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi	14.314	24.287	28.094	33.362	36.452
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	5.387	12.192	11.072	10.921	10.087
Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	47.598	66.810	28.549	31.745	31.909
Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan	12.085	11.022	10.883	11.779	14.237

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, tahun 2013-2017

Berdasarkan beberapa data yang telah dibahas sebelumnya, timbul masalah bahwa sebagai negara agraris tetapi jumlah pembiayaan yang disalurkan ke sektor pertanian masih sangat rendah. Tentunya ini menjadi masalah yang perlu diperhatikan dari sisi perbankan karena jika terlalu bergantung pada bantuan pemerintah bukanlah solusi yang tepat. Hal ini menimbulkan pertanyaan untuk tujuan perbankan syariah seperti keadilan

sosial-ekonomi dan pemerataan distribusi pendapatan. Adanya perbankan syariah dengan sistem bagi hasil diharapkan dapat membantu meningkatkan pertumbuhan sektor pertanian dari sisi akses permodalan.

Kapabilitas perbankan syariah untuk penyaluran pembiayaan di pengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Banyak faktor yang mempengaruhi pembiayaan dari faktor internal, diantaranya seperti Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF) sektor pertanian, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Return on Asset* (ROA). Sedangkan dari faktor eksternal dapat dipengaruhi oleh Inflasi.

Faktor internal yang pertama adalah Dana Pihak Ketiga (DPK). Dana Pihak Ketiga merupakan sumber dana yang paling besar dari masyarakat. Dana dari masyarakat tersebut dihimpun oleh bank dan disalurkan kembali ke masyarakat yang membutuhkan permodalan dalam bentuk pembiayaan. Penyaluran pembiayaan ini merupakan kegiatan bank yang paling utama untuk menghasilkan keuntungan (Pratama, 2010). Semakin tinggi jumlah Dana Pihak Ketiga yang dihimpun oleh bank maka laba bank akan meningkat yang selanjutnya jumlah pembiayaan yang disalurkan juga meningkat (Dendawijaya, 2009).

Faktor internal yang kedua adalah *Non Performing Financing* (NPF) sektor pertanian. *Non Performing Financing* merupakan rasio untuk mengukur risiko pembiayaan gagal bayar oleh debitur (Darmawan, 2004). Semakin tinggi tingkat *Non Performing Financing* maka semakin tinggi risiko

pembiayaan yang ditanggung oleh bank. Tingginya tingkat *Non Performing Financing* mengakibatkan laba yang diterima berkurang sehingga akan mengurangi tingkat pembiayaan yang di salurkan.

Faktor internal yang ketiga adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR). *Capital Adequacy Ratio* merupakan rasio kecukupan modal bank menurut risiko. *Capital Adequacy Ratio* bertujuan untuk memastikan jika dalam aktivitasnya bank mengalami kerugian maka ketersediaan yang dimiliki oleh bank dapat meng-*cover* kerugian tersebut. Semakin tinggi tingkat *Capital Adequacy Ratio* maka bank semakin kuat bertahan menghadapi risiko pembiayaan.

Faktor internal yang keempat adalah *Return on Asset* (ROA). *Return on Asset* merupakan rasio untuk mengukur kemampuan manajemen bank untuk mendapatkan keuntungan. Jika tingkat *Return on Asset* tinggi maka keuntungan yang didapatkan bank juga tinggi. Tingginya tingkat *Return on Asset* akan meningkatkan kepercayaan deposan sehingga akan mendepositkan dana mereka di bank yang kemudian akan meningkatkan keuntungan bank. Keuntungan yang tinggi menunjukkan bahawa akan lebih banyak dana yang di salurkan ke berbagai sektor ekonomi (Pratami, 2011).

Faktor eksternal yang mempengaruhi pembiayaan sektor pertanian adalah inflasi. Inflasi merupakan kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan berlangsung terus menerus. Inflasi yang terus meningkat menyebabkan kegiatan produktif tidak menguntungkan. Pemilik modal

biasanya lebih suka menggunakan dananya untuk spekulasi yaitu dengan membeli harta-harta tetap seperti tanah, rumah dan bangunan. Tentu saja terjadinya inflasi ini menurunkan minat masyarakat untuk menyimpan dananya di bank sehingga akan berdampak pada pemberian pinjaman (Prathama dan Manurung, 2004).

**Tabel 1.4.**  
**Tingkat Pembiayaan Sektor Pertanian (PSP), Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF) sektor pertanian, Capital Adequacy Ratio (CAR), Return on Asset (ROA) dan Inflasi (INF)**

Variabel	2013	2014	2015	2016	2017
PSP (Y)	3165	5679	7950	8531	10419
DPK (X1)	183534	217858	231175	279335	334719
NPF (X2)	166	404	431	380	322
CAR (X3)	14,42	16,1	15,02	16,63	17,91
ROA (X4)	2,0	0,8	0,84	0,94	1,17
INF (X5)	8,38	8,36	3,35	3,02	3,61

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, tahun 2013-2017.

Tabel 1.4. di atas menunjukkan tingkat faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi pembiayaan sektor pertanian pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) tahun 2013 hingga tahun 2017. Pembiayaan sektor pertanian tiap tahunnya terus meningkat meskipun pada tahun 2015 hanya meningkat sebesar Rp 2.271 miliar dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang meningkat sebesar Rp 2.514 miliar. Hal ini dikarenakan laporan Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan mengalami perubahan metode data, yaitu sektor perikanan sudah terpisah dari sektor pertanian yang sebelumnya masih menjadi satu. Dana Pihak Ketiga (DPK) juga mengalami peningkatan tiap tahunnya dengan kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar Rp 48.160

miliar. *Non Performing Financing* mengalami peningkatan dari tahun 2013 ke tahun 2014, tetapi dari tahun 2014 hingga tahun 2017 tingkat *Non Performing Financing* menurun. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terus mengalami peningkatan meskipun pada tahun 2015 turun menjadi 15,02 persen. *Return on Asset* (ROA) mengalami penurunan dari 2 persen pada tahun 2013 menjadi 0,8 persen pada tahun 2014 dan terus mengalami kenaikan dari tahun 2015 hingga tahun 2017. Inflasi mengalami penurunan dari tahun 2013 hingga tahun 2015 dengan penurunan terbesar terjadi dari tahun 2014 ke tahun 2015 sebesar 5,01 persen. Inflasi mulai meningkat pada tahun 2017 sebesar 0,59 persen dari periode sebelumnya.

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian dan mempublikasikan hasil penelitian mereka mengenai pengaruh variabel seperti Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF) sektor pertanian, *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return on Asset* (ROA) dan Inflasi terhadap pembiayaan sektor pertanian. Beberapa temuan tersebut ada yang signifikan dan tidak. Penelitian Amalia (2016) tentang faktor yang mempengaruhi pembiayaan sektor pertanian di Indonesia menjelaskan bahwa NPF sektor pertanian signifikan negatif terhadap pembiayaan sektor pertanian dan CAR signifikan positif terhadap pembiayaan sektor pertanian. Sedangkan variabel Inflasi, DPK dan ROA tidak signifikan terhadap pembiayaan sektor pertanian. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Irfan Syauqi Beik dan Aprianti (2013) bahwa DPK signifikan negatif terhadap pembiayaan sektor pertanian, sedangkan

variabel NPF dan Inflasi tidak signifikan terhadap pembiayaan sektor pertanian.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk menganalisis pengaruh variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF) sektor pertanian, *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return on Asset* (ROA) dan Inflasi terhadap pembiayaan sektor pertanian. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Perbankan Syariah Sektor Pertanian di Indonesia Tahun 2013–2017**”.

## **B. Batasan Masalah**

Permasalahan yang akan diteliti fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan perbankan syariah sektor pertanian periode tahun 2013-2017 dengan menggunakan data bulanan. Variabel dependen yang digunakan adalah tingkat pembiayaan sektor pertanian. Sedangkan variabel independen yang digunakan adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF) sektor pertanian, *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return on Asset* (ROA) dan Inflasi.

### C. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh hubungan jangka pendek dan jangka panjang variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF) sektor pertanian, *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return on Asset* (ROA) dan Inflasi terhadap pembiayaan sektor pertanian perbankan syariah di Indonesia tahun 2013-2017?

### D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh hubungan jangka pendek antara Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF) sektor pertanian, *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return on Asset* (ROA) dan Inflasi terhadap Pembiayaan Perbankan Syariah Sektor Pertanian di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh hubungan jangka panjang antara Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF) sektor pertanian, *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return on Asset* (ROA) dan Inflasi terhadap Pembiayaan Perbankan Syariah Sektor Pertanian di Indonesia.

## **E. Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang yang telah di paparkan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan beberapa manfaat, yaitu:

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu ekonomi islam, menambah wawasan tentang dunia perbankan syariah, memberikan informasi yang di butuhkan sebagai referensi dan perbandingan untuk penelitian berikutnya terkait dengan penelitian serupa.

### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi bagi perbankan maupun instansi terkait dalam membuat kebijakan-kebijakan terkait pembiayaan perbankan syariah sektor pertanian kedepannya.

### **3. Manfaat Penulis**

Seluruh tahapan dan hasil dalam penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan mengembangkan pengetahuan tentang pembiayaan khususnya pembiayaan sektor pertanian pada perbankan syariah.